

Implementasi Strategi Manajemen Dalam Konteks Pelestarian Budaya

Nanang Koswara

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Barat

E-mail : nkoswara@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and give the input of strategy implementation of management, consist of: program, budget, procedure. 1) To analyze the program arrangement and implementation in cultural conservation. 2) To analyze the budgeting arrangement and implementation that stated by the Statement of Governor of West Java. 3) To analyze the procedure between the sector of culture of Regency/City of The tourism and culture departement, the Cultural Community and Stakeholder in the activity. The study used qualitative analysis approach with the single case study. There are 8 (Eight) key informants defined by certain criteria. Those are: The 4 (Four) key informants of Cultural Community as external and the 4 (Four) key informants of Cultural Manager as internal. From the collection and analysis of data and information can be seen that: 1) As guidance and a basis of program arrangement and implementation of cultural conservation, the tourism and culture departement has done the activities according to people expectations. Although there are many cultural product and people expectations and the bounded regulations, The Tourism and culture department of West Java has not been optimal facilitated yet. 2) The method of budgetting arrangement and implementation that stated by the Statement of Governor of West Java is still used as a basis to determine a budget, because the statement of budgetting is not absolutely an authority of The tourism and culture departement. But in order to be optimal, The Statement of Governor of West Java must be specifically separated, that is The Statement of Budgetting and Cultural Management. 3) The procedure has been done between the sector of culture of Regency/City of the Tourism and Cultural Departement, cultural community, and the stakeholder in doing the activities. It has been done according to expectations of the part of cultural community.

Keywords: strategy management, strategy implementation, cultural conservation.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memberikan masukan dalam implementasi strategi manajemen yang meliputi program, anggaran dan prosedur : 1). untuk mengkaji dan menganalisis penyusunan dan pelaksanaan program dalam pelestarian budaya; 2). Untuk mengkaji dan menganalisis penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat; 3). Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur antara disparbud bidang kebudayaan dengan kabupaten/kota, komunitas budaya dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan single case study. Ada 8 (delapan) Informan kunci yang ditetapkan dengan kriteria 4 (empat) Informan kunci komunitas budaya sebagai eksternal, 4 (empat) Informan kunci pengelola budaya sebagai internal yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil pengumpulan dan analisis data dan informasi dapat diketahui bahwa : 1). Sebagai Pedoman dan dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang menuju pada pelestarian budaya, disparbud telah melaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pijakan penyusunan dan pelaksanaan program, namun karena banyaknya garapan budaya dan harapan masyarakat serta regulasi yang sangat mengikat maka disparbud belum dapat memfasilitasi dan

melaksanakan dengan optimal. 2). Cara penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat, tetap dijadikan dasar dalam penetapan anggaran, karena dalam penetapan anggaran tidak sepenuhnya kewenangan dispartubud, namun agar lebih optimal kepgub tersebut terpisah khusus kepgub anggaran pengelolaan kebudayaan 3). Prosedur yang dilakukan antara dispartubud bidang kebudayaan dengan kabupaten/kota, komunitas budaya dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan sebagian harapan masyarakat komunitas budaya.

Kata kunci : manajemen strategi, implementasi strategi, pelestarian budaya.

PENDAHULUAN

Manajemen strategi merupakan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen Strategi, Fred R. David, (2005:19). Strategi kebudayaan sebetulnya lebih luas daripada menyusun suatu policy tertentu mengenai kebudayaan. Di belakang policy kebudayaan seperti disusun oleh pemerintah atau diperjuangkan oleh sekelompok seniman atau ilmuwan, terpaparlah masalah-masalah yang lebih luas jangkauannya. Strategi Kebudayaan, C.A, Van Peursen, (1988).

Pengelolaan atau manajemen merupakan suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. *"Management as working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals"* (pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi). Hersey dan Blanchard menurut Stoner dalam Sujana (2000:17).

"Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the efforts of organizing members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals" Sumijo dan Soebedo dalam Sujana (2000 : 17). Bila dikaji dari dua pengertian di atas, manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan,

mengendalikan dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pengelolaan pada konsep kebudayaan, atau peralatan konsep kebudayaan mempunyai maksud bahwa, filsafat kebudayaan bukan lagi suatu tujuan tersendiri, melainkan sebuah alat atau sarana merenungkan tentang kebudayaan bukan semata-mata merupakan suatu usaha teoritis, melainkan menyediakan sarana-sarana yang dapat membantu memaparkan suatu strategi kebudayaan untuk hari depan. Manajemen Strategi, Fred R. David, (2005:10). Peninggalan kehidupan kebudayaan (sejarah kebudayaan) dimasa lalu, tidak saja ditunjukkan oleh hadirnya berbagai peninggalan sejarah, namun juga oleh adanya berbagai naskah berharga, seperti naskah *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* pada jaman pemerintahan Sri Baduga Maharaja (1482 – 1521M) di Pajajaran. Isinya menjelaskan berbagai bentuk dinamika kehidupan budaya saat itu yang melekat pada kehidupan masyarakatnya, dari berbagai bentuk unsur budaya yang berupa berbagai peninggalan, termasuk dalam bentuk budaya lisan (takbenda), wujud bahasa dengan segala kaidah baik yang mengandung sifat statis maupun yang mengandung sifat dinamis.

Disamping hadirnya unsur-unsur budaya lokal (kearifan lokal) yang sifat asli (*original*), pengaruh budaya dari luar Jawa Barat banyak diadopsi oleh masyarakat Jawa Barat (termasuk Provinsi Banten dan tataran barat Provinsi Jawa Tengah) dalam dinamika *akuturasi* maupun

dinamika *enkulturasi*. Perubahan-perubahan budaya yang terjadi di Jawa Barat pada hakekatnya merupakan hasil gabungan antara dinamika *sentrifugal* dan dinamika *sentripetal*, artinya produk-produk perubahan budaya tersebut merupakan garis konvergensi antara daya yang datang dari luar dengan daya dari unsur-unsur kebudayaan asal. Selain budaya takbenda (*intangible*), budaya bendapun (*tangible*) berupa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebudayaan, merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar (Koentjaraningrat, 1973). Kebudayaan dalam konteks Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya (*pelestarian budaya*), dan pengembangan pemanfaatan aspek bahasa, kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai-nilai tradisional, kesenian, dan permuseuman, sebagai aset dan potensi daerah Jawa Barat.

Dilihat dari berbagai aspek kebudayaan yang hidup di Jawa Barat dalam pembangunan kebudayaan yang menuju *pelestarian budaya* perlu adanya penanganan yang lebih baik. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat di Bidang Kebudayaan seperti Program, Anggaran dan Prosedur pelaksanaan kegiatan yang disusun setiap tahun baik yang parsial maupun yang monumental lebih mengarah terhadap kebutuhan yang diharapkan oleh komunitas kebudayaan tentunya yang mengarah dan menuju *pelestarian budaya*.

Hasil pengamatan sementara bahwa dalam penyusunan *program* di Disparbud tidak berdasarkan terhadap data-data tetapi semata-mata hasil pemikiran-pemikiran yang tentunya hasil pemikiran tersebut sangat terpengaruh oleh latar belakang, pengalaman (*experiential*) dan kemampuan serta pendidikan pengelola kebudayaan. Bentuk kegiatan yang diprogramkan setiap tahun tentunya selalu ditunjang dengan *anggaran* dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diatur oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 910/Kep.1183-Admbang/2011 tanggal : 16 September 2011, Tentang Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012, yang mengatur segala sesuatu yang sifatnya pendukung terlaksananya sebuah kegiatan.

Isu *strategi* yaitu nomenklatur kebudayaan yang beraneka ragam sangat mengganggu terhadap berjalannya *prosedur* pelaksanaan program yang berakibat tidak efisien dan tidak produktif dalam pembinaan kebudayaan di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat,

Prosedur yang tidak terbangun dengan baik dan tidak terlaksananya *Standar Operasional Prosedur (SOP)*, seperti lemahnya koordinasi antara lembaga, pembangunan kebudayaan merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lain, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan kelembagaan dalam wujud sinergitas dan koordinasi memegang peranan kunci untuk membuka keterpaduan antar pihak dalam pembangunan kebudayaan, sehingga pihak terkait swasta, LSM, organisasi-organisasi kebudayaan dan masyarakat komunitas akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kebudayaan. Hubungan antara sosial profesi perlu ditingkatkan, sinergitas program antar lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kota serta kabupaten perlu lebih diberdayakan.

Dari berbagai analisis tersebut bukan suatu hal yang ringan bagi Provinsi Jawa Barat, tanggung jawab menjadi lebih besar dalam melestarikan kebudayaan dengan melalui

pelaksanaan program, penyusunan anggaran dan melakukan prosedur pelaksanaan kegiatan kebudayaan. Dalam paparan tentang kebudayaan sebelumnya yang sangat luas, penulis akan mencoba mengemukakan hasil pengamatan sementara berupa data-data implementasi strategi yaitu *program*, *anggaran* dan *prosedur* pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah Jawa Barat yang tentunya mengarah pada lima kelompok budaya diantaranya, Bahasa, kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisional, permuseuman dan kesenian, lebih rinci penulis akan mengemukakan berbagai permasalahan satu persatu dari data-data yang diperoleh.

Di Jawa Barat tersebar bahasa daerah yang memiliki dialek-dialek sesuai dengan letak geografis, stratifikasi sosial, atau profesi tiap-tiap kelompok penutur dan hanya dipahami atau dimengerti oleh penuturnya. Sampai saat ini bahasa daerah beserta dialek-dialeknya tersebut masih hidup di masyarakatnya serta dilindungi oleh negara, antara lain bahasa Sunda, bahasa Cirebon, dan bahasa Melayu Betawi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat di Bidang Kebudayaan dalam memelihara dan mengembangkan bahasa daerah sampai saat ini masih belum optimal. Dimana instansi terkait Disparbud Provinsi Jawa Barat dalam misi-nya bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan (pelestarian budaya), baik dalam *program*, *anggaran* dan *prosedur* pelaksanaannya masih kurang terarah pada keberadaan kondisi kebahasaan saat ini, yang semakin menyempit dan perkembangan yang kurang terkontrol dimana bahasa daerah yang hidup dan berkembang di masyarakat sebarannya (komunitas), hal ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi bahasa baik pengaruh dari bahasa nasional maupun bahasa internasional (inggris), yang menjadi bahasa gaul, yang lebih mengawatirkan dimana undak usuk basa sebagai etika basa terutama dalam bahasa sunda sudah jarang digunakan. *Kedua* dalam kepurbakalaan yang biasa disebut situs atau cagar budaya sesuai dengan yang

tercantum pada Undang-undang No. 11 tahun 2010, tentang cagar budaya bahwa kepurbakalaan salah satu peninggalan budaya yang harus dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan, untuk mengetahui lebih jauh mengenai kepurbakalaan atau cagar budaya di Provinsi Jawa Barat.

Dari sekian banyak potensi budaya yang berupa cagar budaya di Jawa Barat, hanya beberapa cagar budaya yang terlindungi, dikembangkan dan tentu dimanfaatkan oleh Disparbud dan dinas yang terkait dengan kebudayaan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pengelolaan kepurbakalaan di Jawa Barat yang sifatnya sudah level nasional tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi sudah dikelola bersama-sama dengan pemerintah pusat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, karena banyak kendala dalam berbagai kebijakan pemerintah terutama dalam pengelolaan program, anggaran dan prosedur yang sangat kaku, dan tidak sesuai dengan pengelolaan kebudayaan sangat mempengaruhi terhadap implementasi pelestarian budaya di bidang kepurbakalaan. Permasalahan-permasalahan pada kepurbakalaan tersebut selanjutnya oleh bidang kebudayaan ditangani dengan *implementasi strategi manajemen* yang meliputi *program*, *anggaran* dan *prosedur*.

Ketiga dalam nilai tradisional (kearifan lokal), ragamnya yang begitu banyak dan komplek dari tatanan kehidupan, sejarah, upacara ritual, kampung adat, pertanian, makanan dan masih banyak yang lainnya tentunya membutuhkan pendataan yang menampakan data analisis untuk menunjang terhadap pemrograman, penganggaran dan prosedur yang harus ditempuh untuk mencapai pelestarian budaya.

Nilai-nilai budaya meliputi naskah kuno, cerita rakyat, ungkapan tradisional, permainan rakyat, upacara tradisional, sedangkan sistem budaya meliputi sistem kemasyarakatan, sistem religi dan pengetahuan, sistem ekonomi tradisional, sistem teknologi tradisional dan lingkungan budaya yang meliputi pola lingkungan budaya, perubahan lingkungan budaya, hubungan antar budaya yang tersebar

di daerah Jawa Barat yang unik dan rumit dalam pengelolaannya. Disparbud sebagai pemegang kebijakan tentunya perlu meningkatkan pemrograman, penganggaran dan prosedur pelaksanaan untuk membangun penataan dan perbaikan permuseuman, implementasi strategi tersebut sebaiknya melihat kebutuhan internal dan eksternal keberadaan museum.

Kelima dalam kesenian, saat ini bidang seni di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang berat. Tantangan ini berkaitan dengan upaya-upaya seni dapat dijadikan sebagai sebuah industri. Seni yang merupakan salah satu cabang kebudayaan kemungkinan dikembangkan sebagai industri, akan tetapi kondisi seni di Indonesia keadaannya belum sebagai mana yang diharapkan. Perkembangan seni pertunjukan yang ada di Indonesia diharapkan sebagai salah satu kesenian yang paling "menawan", mungkin paling dapat terjangkau oleh halayak yang lebih besar tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Sebuah harapan bahwa kesenian Indonesia dapat lebih hidup dan dapat hadir di tengah halayak yang lebih besar.

Untuk dapat mewujudkan itu salah satu alternatifnya adalah pembenahan sistem pengelolaan organisasi kesenian. Organisasi sangat berperan untuk tumbuh dan suburnya kesenian, dengan melalui pengelolaan organisasi akan tercipta kualitas baik pelaku maupun produk yang dihasilkan. Pada akhirnya akan selalu berupaya meningkatkan mutu dan memberi kepuasan pada pelanggan. Pewarisan seni, yang seharusnya ada perhatian khusus dari Disparbud untuk perlindungan terhadap seni-seni yang mengandung nilai seni yang tinggi, selanjutnya Revitalisasi, ini pun suatu hal yang perlu diperhatikan dimana manfaat dari revitalisasi ini adalah untuk mengangkat kembali kesenian-kesenian yang sudah punah dari tatanan kesenian.

Tidak berkembang dan punahnya jenis kesenian di Jawa Barat merupakan sebuah permasalahan diantaranya dalam implementasi strategi manajemen dalam kesenian yang tidak optimal yang dilakukan oleh Disparbud sebagai

institusi yang mempunyai kewenangan dan kebijakan dalam pengelolaan kesenian.

Menurut beberapa tokoh masyarakat dan budayawan bahwa saat ini terasa adanya kesenjangan antara implementasi strategi manajemen Disparbud Provinsi Jawa Barat dengan yang diharapkan oleh masyarakat komunitas yang seharusnya dijadikan pijakan atas pencapaian tujuan pelestarian kebudayaan, ini terbukti dengan ketidak selarasan antara, *program, anggaran* dan *prosedur* yang diarahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh publik. Tidak dapat dipungkiri pengaruh dari disentralisasi memberikan warna yang berbeda terhadap implementasi strategi terhadap warisan budaya, implementasi strategi Disparbud Provinsi Jawa Barat seharusnya menjadi pijakan strategi dinas-dinas terkait tentang kebudayaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kebudayaan bahwa Pelestarian adalah Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang menjadi pijakan dalam mengelola kebudayaan, termasuk pada implemntasi strategi Disparbud yang harus didukung oleh program-program, penganggaran dan prosedur yang berkelanjutan sehingga kebudayaan dapat dilestarikan.

Tugas dan fungsi Bidang Kebudayaan dan kesenian merupakan sebagai gudang data (database) kunci keberhasilan dalam perencanaan dan program harus berdasarkan data yang akurat. Sedangkan visualisasi berada pada tugas dan fungsi pengelolaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disparbud. Saat ini tugas dan fungsi yang seharusnya seperti yang dikemukakan sebelumnya tidak terealisasi, sedangkan yang dilaksanakan sebatas promosi budaya dan promosi kesenian sedangkan data yang sangat dibutuhkan tentunya database yang akurat untuk merencanakan dan memprogramkan kebudayaan dalam mencapai pelestarian budaya sangat memprihatinkan. Seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber di Disparbud tersebut belum terdatabase secara baik karena penjaringan data tidak melalui prosedur. Dengan demikian selain pengelolaan dalam pelaksanaan perencanaan dan program tentunya database di Disparbud

perlu pengelolaan yang optimal dan harus menjadi gudang data yang akurat dari berbagai kelompok budaya tersebut.

Arah Kebijakan dari Strategi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya ada sinergitas dengan strategi Disparbud Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut akan mendukung berjalannya implementasi strategi manajemen Jawa Barat yang lebih baik dan terarah sesuai dengan harapan semua komunitas budaya, baik yang langsung memelihara kebudayaan maupun hanya sebagai pengamat atau pemerhati sektor kebudayaan hal tersebut dapat dijadikan aset untuk menyusun dan melaksanakan program dan sebagai stakeholder untuk bekerja bersama mengelola kebudayaan yang mengarah terhadap pelestarian kebudayaan.

Kesimpulan dari analisis kondisi Disparbud adalah strategi yang diterapkan yaitu strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal dan stability yaitu tidak ada perubahan profit strategi, artinya strategi yang diterapkan lebih menekankan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan program nyata, konsolidasi, yaitu menghindari kelemahan pada pelaksanaan kegiatan. Saran yang diajukan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu 1) dengan program pengembangan nilai budaya dengan melalui kegiatan penyelenggaraan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan museum serta dalam kebahasaan melakukan festival dan lomba penulisan kebudayaan dengan menggunakan bahasa dan sastra daerah Jawa Barat, sosialisasi aksara daerah di masyarakat umum dengan promosi melalui media elektronik dan cetak yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keberhasilan pelestarian budaya; 2) dengan program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya melalui kegiatan lokakarya pengelolaan kekayaan budaya Jawa Barat, inventarisasi berbagai produk karya budaya seniman dan budayawan untuk pemeliharaan dan pengakuan atas HKI, seminar, lokakarya kekayaan dan keragaman budaya Jawa Barat; 3) dengan program memfungsikan/revitalisasi gedung-

gedung kesenian yang sudah ada dan beroperasi dengan kegiatan kreativitas kesenian Jawa Barat dengan melalui kegiatan penelitian, pertunjukan di gedung-gedung kesenian yang ada dan telah beroperasi di kota dan kabupaten, meningkatkan fasilitas dan kenyamanan serta meningkatkan manajemen gedung kesenian, pemetaan kesenian dan kebudayaan sebagai dasar pemberian hak paten melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur, membangun gedung kesenian bertaraf Internasional bekerjasama dengan swasta; 4) dengan program pemeliharaan dan perlindungan kebudayaan melalui kegiatan penelitian untuk penyusunan strategi pemeliharaan dan perlindungan kebudayaan, penyusunan dan penerbitan buku tentang kebudayaan Jawa Barat yang berkontribusi bagi pengembangan teori, karya ilmiah dan memperkaya makna kebudayaan Jawa Barat, penyusunan standar minimal pemeliharaan dan perawatan kebudayaan di Jawa Barat; 5) dengan program perlindungan berbagai karya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui kegiatan sosialisasi perda dan UU HKI, penelitian dan penyusunan buku katalog produk budaya seniman dan budayawan, penyusunan perda dan pergub untuk pengakuan mematenkan karya budaya seniman dan budayawan yang tertuang pada katalog HKI Jawa Barat. 6) dengan program penelitian dan sistem informasi kebudayaan dengan melalui kegiatan penelitian kebudayaan sebagai dasar pembinaan dan pembangunan kebudayaan, inventarisasi hasil-hasil penelitian, jurnal terdahulu yang dilakukan oleh perguruan tinggi, LSM, Konsultan, pemerintah kota dan kabupaten, penyusunan sisten informasi manajemen tentang kebudayaan Jawa Barat; 7) dengan program peningkatan keterampilan, keahlian, kemampuan SDM kebudayaan melalui kegiatan penyusunan kriteria kompetensi dan sertifikasi SDM, pelatihan SDM kebudayaan dari berbagai bidang profesi untuk memperoleh kompetensi dan sertifikasi, membentuk lembaga serifikasi SDM kebudayaan; 8) dengan program penyusunan standar minimal penyelamatan dokumen sejarah, tinggalan sejarah, dan konservasi gedung, rumah bersejarah melalui

kegiatan penelitian terhadap unsur-unsur kesejarahan di kota dan kabupaten, lokakarya penyusunan standar minimal penyelamatan dan pemeliharaan unsur-unsur kesejarahan di Jawa Barat, sosialisasi pemahaman masyarakat tentang arti penting sejarah; 9) dengan program peningkatan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tinggalan purbakala dengan melalui kegiatan sosialisasi tentang kepurbakalaan dan benda cagar budaya/situs, penyusunan standar minimal pemeliharaan dan pengamanan tinggalan kepurbakalaan dan benda cagar budaya/situs di Jawa Barat, pendokumentasian tinggalan kepurbakalaan dan BCB/situs di kota dan kabupaten; 10) dengan program memanfaatkan museum sebagai pusat informasi kebudayaan dengan melalui kegiatan penyediaan sarana auditorium untuk pemutaran film kebudayaan Jawa Barat, penyediaan media informasi dalam bentuk cetakan dan elektronik tentang museum, promosi museum melalui berbagai kegiatan penunjang dan informasi pada berbagai media, melakukan kerjasama dengan berbagai perjalanan wisata; 11) dengan program pagelaran kesenian pada usaha pariwisata dengan melalui kegiatan lokakarya penentuan paket pagelaran jenis-jenis kesenian dengan para seniman dan usaha pariwisata, menyediakan katalog pergelaran berbagai jenis kesenian yang telah siap dipertunjukan, pergelaran kesenian yang berbentuk paket pergelaran kesenian di luar Jawa Barat dan luar negeri; 12) dengan program pembuatan film dokumenter kebudayaan dengan melalui kegiatan inventarisasi para produser film daerah dan nasional, lokakarya untuk penyusunan cerita film kebudayaan, pelaksanaan pembuatan film kebudayaan; 13) dengan program penelitian terhadap para pengusaha/produser film, sarana pertunjukan film, tenaga kerja perfilman, dan perijinan pendirian perusahaan film dan pelaksanaan pembuatan film dengan melalui kegiatan penelitian dan penyusunan unsur-unsur perfilman, penertiban usaha perfilman sarana pertunjukan film, dan pengambilan film (shooting), sosialisasi peraturan dibidang perfilman daerah dan nasional.

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyusunan dan pelaksanaan *program* Disparbud di Bidang Kebudayaan dalam mencapai pelestarian budaya. Adapun tujuannya dalah untuk mengkaji dan menganalisis *prosedur* pelaksanaan antara Disparbud Bidang Kebudayaan dengan Kabupaten/Kota, komunitas budaya, dan stakeholder dalam pelaksanaan program dalam mencapai pelestarian budaya.

METODE

Kajian manajemen berbasis kebudayaan mempunyai teori yang disederhanakan menjadi dua kelompok besar dan sering berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya masih terselubung, permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga data memungkinkan dapat dijaring dengan menggunakan metoda kualitatif. (Sugiyono, 2007 dan Burhan Bungin, 2009). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa teori tentang budaya dapat disederhanakan menjadi dua kelompok besar, yaitu: *pertama*, aliran teori yang memandang budaya sebagai suatu sistem atau organisasi makna. Budaya dianggap semacam pita kesadaran tempat tersimpan memori kolektif suatu kelompok masyarakat tentang mana yang dianggap benar, mana yang dianggap salah, mana yang dianggap baik, mana yang dianggap buruk, mana yang dianggap lebih berharga, dan mana yang dianggap kurang berharga. *Kedua*, aliran teori yang memandang budaya sebagai sistem adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya. Budaya ditempatkan sebagai keseluruhan cara hidup suatu masyarakat yang diwariskan, dipelihara, dan dikembangkan secara turun temurun sesuai dengan tuntutan lingkungan yang dihadapi.

Karena budaya suatu kelompok masyarakat menampakan diri secara berlapis-lapis, maka lapisan demi lapisan perlu dibuka untuk dapat memahaminya. Untuk memahami budaya suatu kelompok masyarakat, tidak ada jalan lain

terkecuali harus menukik hingga kelapisan inti (*the core*). Sebab, lapisan inti itulah yang bisa menjelaskan bagaimana etos, jiwa, atau watak khas suatu kelompok masyarakat sehingga bisa dibedakan dengan kelompok masyarakat lainnya. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan penelitian yang tidak hanya bergerak ditingkat permukaan (*surface behavior*), tetapi juga menukik hingga ke tingkat paling dalam (*tacit knowledge*). Karenanya, peneliti budaya lazim menyatakan: (1) *the ethnographer observes behavior, but goes beyond it to inquire about the meaning of that behavior.* (2) *the ethnografer sees artifacts and natural objects, but goes beyond them to discover what a meaning assign to those objects.* (3) *the ethnografer observes and record emotional states, but goes beyond them to discover the meaning of fear, anxiety, anger, and other feelings.*

Menempatkan budaya suatu sistem adaptasi juga menuntut pendekatan peneliti yang tidak saja mendalam, tetapi harus holistik, sebab, budaya dalam perspektif ini juga dipandang sebagai suatu kombinasi antara bias budaya (berupa norma, nilai, dan kepercayaan) dan preferensi di tingkat perilaku; suatu gabungan segi-segi bersifat kognitif dan segi-segi bersifat behavioral. Karenanya, untuk memahami budaya suatu kelompok masyarakat diperlukan suatu corak penelitian yang bersifat holistik, mementingkan perspektif *emic*, dan mendalam hingga ke *inner behavior*.

Alasan utama menggunakan metoda kualitatif adalah sesuai dengan judul penelitian yaitu: Kajian Implementasi Strategi Manajemen dalam Kontek Pelestarian Budaya, dan penulis mencoba melakukan analisis terhadap sejumlah fenomena tentang program, anggaran, dan prosedur, yang mampu dibaca, ditelaah, dan ditelisik dalam seluruh praktik manajemen yang dilakukan oleh Disparbud bidang kebudayaan yang nantinya penulis berharap dapat melahirkan sebuah masukan sebagai cermin penyusunan dan pelaksanaan implementasi strategi manajemen dalam kontek pelestarian budaya. Untuk mendapatkan pendekatan dan metode yang tepat dan sesuai dengan judul penelitian, butir dan rumusan masalah, ataupun

tujuan dan manfaat penelitian, maka penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif.

Desain penelitian merupakan suatu alat yang menuntun peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memiliki pedoman atau arahan dalam melakukan pengumpulan data, menganalisis, dan menginterpretasikan atau menerjemahkan data yang dikumpulkan dan selanjutnya membuat kesimpulan. Berdasarkan *paradigma* penelitian tersebut maka penelitian diawali dengan mengamati fenomena langkah-langkah pemegang kebijakan baik ditingkat daerah kabupaten/kota atau ditingkat provinsi tentang manajemen sebagai *grand theory*, implementasi strategi sebagai *middle theory* yang meliputi program, anggaran, dan prosedur, dan *applied theory* kebudayaan, selanjutnya mengamati fenomena partisipasi masyarakat terhadap keberadaan kebudayaan yang ada di masyarakat dan merumuskan masalah-masalah.

Langkah selanjutnya setelah merumuskan masalah maka penulis mengidentifikasi implementasi strategi manajemen yang dilakukan oleh Disparbud dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis yang hasilnya sebagai pengembangan implementasi strategi manajemen, lebih lanjut melakukan pengembangan dalam menyusun implementasi strategi manajemen yang mengarah kepada pelestarian budaya, akhir dari penelitian ini merupakan kesimpulan hasil analisis.

Setelah desain penelitian dibentuk, penulis kemudian menetapkan unit analisis. Yin (2011: 14) mendefinisikan bahwa *unit of analysis* sebagai berikut *is related to the way the initial research questions have been defined*. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, secara spesifik difokuskan terhadap implementasi strategi manajemen yang meliputi program, anggaran, dan prosedur Disparbud di sektor kebudayaan.

Sehubungan dengan pengujian, Yin mengemukakan empat aspek pengujian yang harus dilakukan agar suatu penelitian berkualitas, keempat aspek tersebut, yaitu : (1)

Validitas Konstruk; (2) Validitas Internal; (3) Validitas eksternal; (4) Reliabilitas. Pada pengujian ini penulis cukup menggunakan tiga aspek, sedangkan validitas eksternal tidak digunakan, dalam pengolahannya validitas dan reliabilitas diolah dengan menggunakan Software Program "CDC (*Conwal Incorporated and the Centers for Disease Control and Prevention*) EZ-Text Versi 3.06.

Peneliti menganalisis, *Conclusion Drawing/verification*, mereduksi, mengolah data observasi dan hasil wawancara baik dengan eksternal maupun dengan internal, diolah dengan menggunakan Software Program "CDC (*Conwal Incorporated and the Centers for Disease Control and Prevention*) EZ-Text Versi 3.06. membantu penulis dalam memecahkan persoalan dari jalan pintas. Penulis memasukan data, dan membuat kode secara on line dengan mempergunakan kode-kode untuk bagian jawaban khusus, membangun studi kasus atau kasus berseri, melakukan penelusuran database untuk mengidentifikasi bagian-bagian teks untuk menemukan situasi khusus, dan mengekspor data dalam susunan yang luas dari bentuk-bentuk yang ada untuk dianalisis lebih lanjut oleh software EZ-Text tersebut. Software ini dibangun oleh *James W. Carey; Patrick H. Wenzel; Cindy Reilly; John Sheridan; Jill M. Steinberg; dan Katherine G. Harbison* pada tahun 1998. "CDC EZ-Text" (Versi 3.06): Software ini bertujuan untuk mengoleksi, mengatur, dan menganalisis database kualitatif semi struktur, program ini dikembangkan oleh *Conwal Incorporated and the Centers for Disease Control and Prevention*. Program CDC EZ-Text ini dibuat dalam Visual Basic, juga menggunakan program Microsoft Access sebagai struktur database, artinya semua file database mempunyai perluasan nama ".mdb" dapat diolah oleh CDC EZ-Text. CDC EZ-Text dapat dioperasikan pada program Windows 3.1, Windows 95, dan Windows NT (versi 3.51 dan 4.0), dan tidak dikembangkan kembali pada system lain.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, dan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti, mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

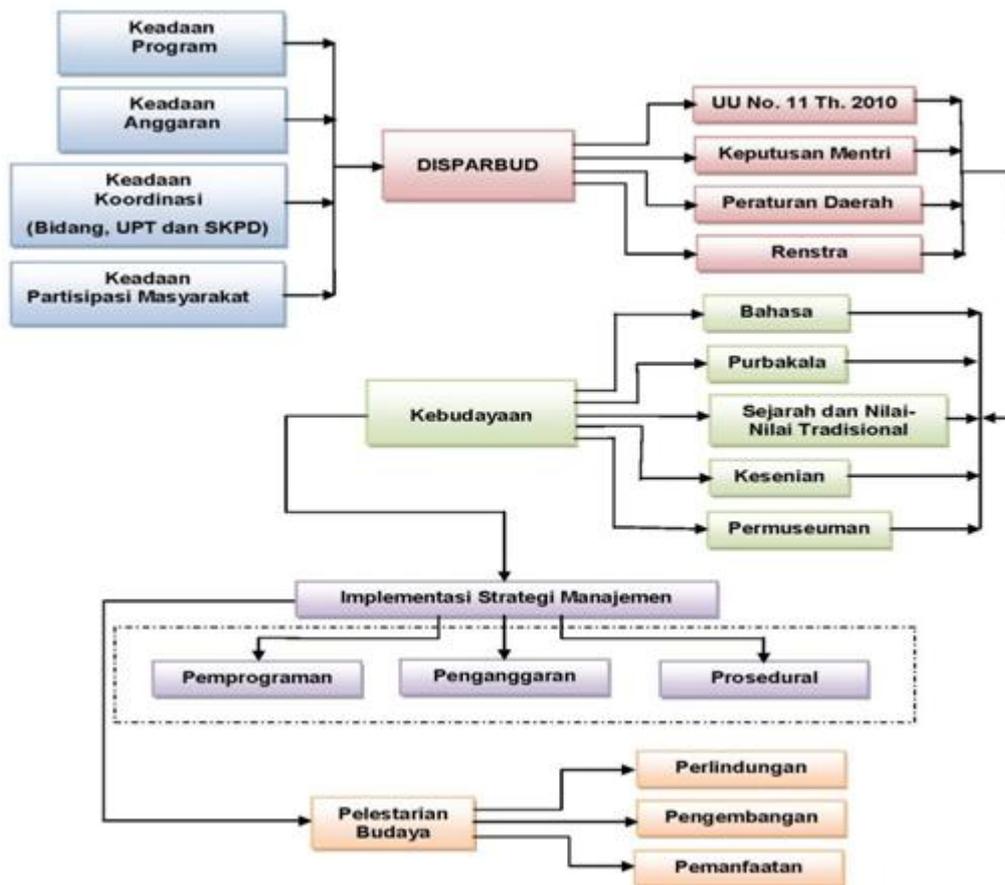
Susan Stainback (1988), menyatakan bahwa triangulasi " *the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one's understanding of what ever is being investigated*". Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih dari beberapa peningkatan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Bogdan (1982), menyatakan " *what the kualitatif researcher is interested in is not truth perse, but rather perspectives. Thus, rather than trying to determine the "truth" of people's perceptions, the purpose of corroboration is to help researchers increase their understanding and the probability that their finding will be seen as credible or worthy of others*". Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum.

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan model Miles-Huberman yang dilakukan sebelum dilapangan dan pada saat dilapangan serta menganalisis hasil data setelah terkumpul seperti pereduksian data, pendeskripsian, dan penyimpulan. analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Dalam implementasi strategi digunakan Analisis SWOT dapat digambarkan dalam suatu diagram untuk memudahkan mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil oleh organisasi sehubungan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dan harus dihadapi oleh organisasi.

HASIL dan PEMBAHASAN

Strategi analisis data hasil penelitian



Gambar 1
 Kerangka Pemikiran

Program Disparbud bidang kebudayaan dapat meningkatkan pencapaian pelestarian budaya sesuai dengan UU No. 11 tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya

Temuan penelitian pada level I (satu) ditingkat internal secara umum tentang program Disparbud, ditingkat internal ini dengan responden ID: 5, ID: 6, ID: 7, dan ID: 8 yang merespon pertanyaan BI 1I, BI 2I, BI 3I, BI 6I, BI 7I, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code BII 1, BII 2, BII 4, dengan demikian pada level satu ditingkat internal menemukan bahwa, berusaha untuk mencapai pada pelestarian budaya, dengan harapan masyarakat yang begitu banyak dan kompleks serta keterbatasan pemerintah dan

langkah-langkah pelaksanaan program yang lebih mengarah pada pelestarian budaya.

Temuan penelitian pada level II (dua) ditingkat internal secara khusus tentang program Disparbud, ditingkat internal ini dengan responden ID: 5, ID: 6, ID: 7, dan ID: 8 yang merespon pertanyaan DIII 1I, DIII 2I, DIII 3I, DIII 5I, DIII 6I, DIII 7I, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code DIII 1, DIII 2, DIII 3, DIII 4, DIII 7, DIII 8, DIII 10, dengan demikian pada level dua ditingkat internal menemukan bahwa, bersama-sama dalam penyusunan program, menghindari status quo, musrenbang sebagai jembatan review program, pengaruh manajerial, penjangkaran data, prosedur yang kurang sesuai, dan alat ukur keberhasilan.

Hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program yang bisa dikatakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program dengan informan yang terungkap bahwa secara garis besar, mayoritas menjawab setuju bahwa implementasi strategi manajemen dapat meningkatkan pelestarian budaya, melalui proses berbagai kegiatan yang mengarah pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Jawa Barat.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata yang menyatakan secara keseluruhan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Hasil penelitian menggambarkan tentang proses berupa payung hukum, kegiatan dan langkah-langkah dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang ditinjau dari berbagai aspek pendukung yang berada pada sangat tinggi.

Hasil penelitian selanjutnya yaitu program-program inti yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai pada tujuan pelestarian budaya yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dengan informan yang terungkap bahwa secara garis besar, mayoritas menjawab setuju bahwa program-program kebudayaan yang sedang dilaksanakan saat ini sebagai implementasi strategi manajemen dapat meningkatkan pelestarian budaya, melalui proses berbagai kegiatan yang mengarah pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Jawa Barat.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata yang menyatakan secara keseluruhan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Hasil Penelitian menggambarkan tentang program-program dan sebagian isu-isu strategi yang ditinjau sebagai fokus program yang berada pada kategori tinggi. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah* sebagai kegiatan inti implementasi strategi manajemen dalam mencapai pelestarian budaya seperti hari bahasa ibu internasional, temu sastra, penghargaan karya sastra, aktualisasi bahasa dan sastra daerah, dan kongres bahasa. Dari beberapa pernyataan yang dijawab pada hasil

wawancara menunjukkan kategori tinggi, namun peneliti memiliki kecenderungan bahwa masih ada beberapa kegiatan inti yang harus difasilitasi sebagai pendukung pada pelestarian budaya dalam kebahasaan.

Anggaran yang diatur oleh Keputusan Gubernur tentang Biaya Belanja Daerah sudah sesuai dengan karakteristik program Disparbud.

Temuan penelitian dengan masyarakat komunitas budaya pada level I (satu) ditingkat eksternal ini secara umum tentang anggaran Disparbud ditingkat eksternal ini dengan responden ID:1, ID: 2, ID: 3, dan ID: 4 yang merespon pertanyaan AI 5E, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code AEI 1, AEI 2, AEI 5, dengan demikian pada level satu ditingkat eksternal menemukan bahwa, anggaran kurang menuju pada pelestarian budaya, perhatian anggaran harus fokus pada keberadaan kebudayaan, dan pemahaman masyarakat terhadap anggaran dengan melalui sosialisasi.

Temuan penelitian dengan masyarakat komunitas budaya pada level II (dua) ditingkat eksternal ini secara khusus tentang anggaran Disparbud ditingkat eksternal ini dengan responden ID:1, ID: 2, ID: 3, dan ID: 4 yang merespon pertanyaan CII 9E, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code CEII 1, CEII 3, CEII 4, CEII 8, CEII 9, dengan demikian pada level dua ditingkat eksternal menemukan bahwa, anggaran kurang menuju pada pelestarian budaya, review program kebudayaan dilakukan setiap tahun, beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya SDM, harapan masyarakat budaya kurang terpenuhi dan kebijakan anggaran kebudayaan terlalu dominan.

Temuan penelitian dengan masyarakat komunitas budaya pada level III (tiga) ditingkat eksternal ini lebih fokus terhadap proposisi kedua tentang anggaran Disparbud ditingkat eksternal ini dengan responden ID:1, ID: 2, ID: 3, dan ID: 4 yang merespon pertanyaan EIII 10E, EIII 11E, EIII 12E, EIII 13E, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code EEIII 10, EEIII 11, EEIII

12, EEIII 13, dengan demikian pada level tiga ditingkat eksternal menemukan bahwa, anggaran pendukung pelestarian budaya harus khusus, sosialisasi standar anggaran dilakukan setiap penyusunan anggaran, kesesuaian pagu anggaran untuk pengelolaan kebudayaan, dan kepub anggaran harus disosialisasikan.

Temuan penelitian dengan key informan budaya pada level III (tiga) ditingkat internal ini lebih fokus terhadap proposisi kedua tentang anggaran Disparbud ditingkat internal ini dengan responden ID: 5, ID: 6, ID: 7, dan ID: 8, yang merespon pertanyaan FIII 10I, FIII 11I, FIII 12I, FIII 13I, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code FIII 10, FIII 11, FIII 12, FIII 13, dengan demikian pada level tiga ditingkat eksternal menemukan bahwa, anggaran yang mendukung pelestarian budaya, mensosialisasikan anggaran, pagu anggaran kebudayaan, dan standarisasi anggaran. Hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan informan yang terungkap bahwa secara garis besar, mayoritas menjawab setuju bahwa implementasi strategi manajemen dapat meningkatkan pelestarian budaya, melalui proses kegiatan penyusunan dan pelaksanaan penganggaran yang mengarah pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Jawa Barat.

Prosedur yang dilakukan untuk pencapaian tujuan program Disparbud bidang kebudayaan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh kabupaten/kota, komunitas budaya, dan stakeholder.

Temuan penelitian dengan masyarakat komunitas budaya pada level I (satu) ditingkat eksternal ini secara umum tentang prosedur Disparbud ditingkat eksternal ini dengan responden ID:1, ID: 2, ID: 3, dan ID: 4 yang merespon pertanyaan AI 4E, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code AEI 1, AEI 2, AEI 3, AEI 4, dengan demikian pada level satu ditingkat eksternal menemukan bahwa, prosedur kurang menuju pada pelestarian budaya, perhatian harus fokus pada keberadaan kebudayaan,

regulasi sebagai pedoman pengelolaan kebudayaan, prosedur dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.

Temuan penelitian dengan masyarakat komunitas budaya pada level II (dua) ditingkat eksternal ini secara umum tentang prosedur Disparbud ditingkat eksternal ini dengan responden ID:1, ID: 2, ID: 3, dan ID: 4 yang merespon pertanyaan CII 8E, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code CEII 1, CEII 2, CEII 3, CEII 4, CEII 8, dengan demikian pada level dua ditingkat eksternal menemukan bahwa, langkah-langkah penyusunan program melalui prosedur, maju mundurnya kegiatan Disparbud dapat dilihat dari prosedur, review program kebudayaan, beberapa hal yang mempengaruhi prosedur, dan harapan masyarakat budaya tentang kerja bersama.

Temuan penelitian dengan masyarakat komunitas budaya pada level III (tiga) ditingkat eksternal ini lebih fokus terhadap proposisi 3 (tiga) tentang prosedur Disparbud. Ditingkat eksternal ini dengan responden ID:1, ID: 2, ID: 3, dan ID: 4 yang merespon pertanyaan EIII 14E, EIII 15E, EIII 16E, EIII 17E, EIII 18E, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code EEIII 14, EEIII 15, EEIII 16, EEIII 17, EEIII 18, dengan demikian pada level tiga ditingkat eksternal menemukan bahwa, langkah-langkah pelestarian budaya, prosedur pengelolaan kebudayaan, kesesuaian prosedur, sebagai rekan kerja Disparbud, tehnik bekerjasama.

Temuan penelitian pada level I (satu) ditingkat internal secara umum tentang prosedur Disparbud, ditingkat internal ini dengan responden ID: 5, ID: 6, ID: 7, dan ID: 8 yang merespon pertanyaan BI 4I, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code BII 1, BII 2, BII 3, BII 4, dengan demikian pada level satu ditingkat internal menemukan bahwa, berusaha untuk mencapai pada pelestarian budaya, harapan dan keterbatasan pemerintah, kerjabersama dan sosialisasi regulasi, langkah-langkah prosedur pelaksanaan program.

Temuan penelitian pada level II (dua) ditingkat internal secara khusus tentang

prosedur Disparbud, ditingkat internal ini dengan responden ID: 5, ID: 6, ID: 7, dan ID: 8 yang merespon pertanyaan DII 8I, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code DIII 1, DIII 2, DIII 8, DIII 9, DIII 10, dengan demikian pada level satu ditingkat internal menemukan bahwa, bersama-sama dalam penyusunan program, status quo, prosedur yang kurang sesuai, informasi anggaran kebudayaan, alat ukur keberhasilan.

Temuan penelitian dengan key informan budaya pada level III (tiga) ditingkat internal ini lebih fokus terhadap proposisi ketiga tentang prosedur Disparbud ditingkat internal ini dengan responden ID: 5, ID: 6, ID: 7, dan ID: 8, yang merespon pertanyaan FIII 14I, FIII 15I, FIII 16I, FIII 17I, FIII 18I, dan code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code FIII 14, FIII 15, FIII 16, FIII 17, FIII 18, dengan demikian pada level tiga ditingkat internal menemukan bahwa, langkah-langkah optimalisasi pelestarian budaya, sistem kerjasama, prosedur yang diharapkan komunitas budaya, kerjabersama seniman dan budayawan dan teknik kerjabersama seniman dan budayawan. Hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar prosedur dengan informan yang terungkap bahwa secara garis besar, mayoritas menjawab setuju bahwa implementasi strategi manajemen dapat meningkatkan pelestarian budaya, melalui proses kegiatan prosedur yang mengarah pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Jawa Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kajian Implementasi Strategi Manajemen Dalam Kontek Pelestarian Budaya. Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Program Disparbud bidang kebudayaan dapat meningkatkan pencapaian pelestarian budaya sesuai dengan UU No. 11 tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi Perlindungan,

Pengembangan, dan Pemanfaatan, Perda No. 5 tahun 2003, tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah. Perda No. 6 tentang Pemeliharaan Kesenian. Perda No. 7 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum, dapat ditunjukkan dengan :

- Sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program Dinas pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, khusus di sektor kebudayaan, diantaranya : Data lengkap sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program, yang diolah bersama masyarakat komunitas budaya untuk mencapai pelestarian budaya, menganalisis, melakukan review, adanya keterkaitan dengan program sebelumnya, program berkelanjutan untuk mencapai pelestarian budaya, bagian perencanaan mengarahkan setiap program terhadap tercapainya visi dan misi disparbud, tupoksinya harus saling berkaitan dan memperkecil ego sektoral.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, khusus di sektor kebudayaan, diantaranya : setiap penyusunan program harus berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, harus banyak mendapatkan informasi dari masyarakat komunitas budaya tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat, dengan adanya musrenbangda tujuannya adalah untuk memfasilitasi program yang diharapkan dan sekaligus menjaring apa yang diharapkan oleh masyarakat komunitas budaya, apapun bentuknya program harus berorientasi pada kebutuhan kab/kot dan mengembangkan apa yang dimiliki oleh komunitas budaya daerahnya, Kabupaten/kota akan bergairah, merasa bahwa disparbud itu ada bila program itu dikerjakan bersama masyarakat komunitas

- budaya, masyarakat harus bisa memberikan motivasi dan membantu pada setiap penyusunan dan pelaksanaan program karena sampai saat ini disparbud masih sebatas melaksanakan proyek saja.
2. Anggaran yang diatur oleh Keputusan Gubernur tentang Biaya Belanja Daerah sudah sesuai dengan karakteristik program Disparbud bidang sektor kebudayaan untuk menunjang pada pelestarian budaya, dapat ditunjukkan dengan :
 - a. Peraturan penganggaran : pagu anggaran tergantung dari pemanfaatan anggaran bilamana dimanfaatkan dengan baik tentu akan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, pada dasarnya anggaran yang diatur Kepgub itu kaku namun tergantung pengelolaannya dan teknik penganggaran, anggaran kebudayaan tidak sama dengan anggaran untuk fisik pengelolaan anggaran untuk kebudayaan harus diatur tersendiri karena kebudayaan sangat unik, Kepgub cenderung pada pengaturan untuk fisik sedangkan untuk kebudayaan sangat berbeda alangkah baiknya bila kepgub tentang anggaran kebudayaan terpisah dengan aturan untuk fisik,
 - b. Sosialisasi anggaran : masyarakat komunitas budaya tidak tahu tentang anggaran karena tidak pernah ada sosialisasi tentang anggaran yang dikelola oleh disparbud, perlu dilakukan sosialisasi anggaran yang sudah disahkan oleh pemerintah dan hal itu tidak menyalahi aturan pada regulasi anggaran.
 3. Prosedur yang dilakukan untuk pencapaian tujuan program Disparbud bidang sektor kebudayaan, dapat ditunjukkan dengan :
 - Langkah-langkah yang dilakukan disparbud untuk mencapai tujuan pelestarian budaya, diantaranya sebagai berikut : Selama ini disparbud telah melakukan langkah-langkah seperti penyusunan perda no. 5, 6 dan 7, kerjasama dengan komunitas budaya atau dengan seniman budayawan serta dengan kabupaten kota, namun langkah-langkah tersebut belum dilakukan dengan optimal. Musrenbangda yang telah dilakukan disparbud, tanpa adanya review dan koordinasi dengan seniman dan budayawan maka optimalisasi pelestarian budaya tidak akan tercapai. Pelaksanaan program melalui kegiatan-kegiatannya harus dilakukan bersama dengan ahlinya yang sudah dipercaya oleh komunitas budaya dan tetap melakukan koordinasi dengan kabupaten kota.
 - Kerjasama yang dilakukan disparbud untuk mencapai tujuan pelestarian budaya, diantaranya sebagai berikut : Sistem kerja bersama dengan seniman budayawan dan disparbud harus melakukan pendekatan-pendekatan dan pendampingan khusus terhadap organisasi-organisasi yang berbasis kebudayaan dan tidak dilakukan berdasarkan perorangan. Prosedur yang dilakukan disparbud saat ini banyak bekerja sama dengan komunitas budaya kelas menengah tidak dengan kelas atas yang mengakibatkan menurunnya nilai kerja disparbud. Prosedur yang dilakukan disparbud berusaha untuk menyesuaikan dengan harapan masyarakat namun banyaknya yang harus dikelola dalam kebudayaan sangat sulit untuk memfasilitasi semua harapan masyarakat karena kemampuan dan anggaranpun sangat terbatas. Lingkungan internal dipemerintahan Jawa Barat saat ini kurang mengarah terhadap pemikiran-pemikiran kritis yang berdasar dari kesadaran budaya. Disparbud dalam menggulirkan programnya belum

sampai terhadap masyarakat budaya yang lebih dalam mungkin permukaannya pun belum terjamah dengan baik.

REFERENSI

Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
Bogdan, R. C., & Biklen, K. S (1982). *Qualitative Research For Education; An*

Introduction to Theory and Methods; Boston London; Allyn and Bacon.
Stainback, S., & Stainback, W (1988). *Understanding & Conducting Qualitative Research*; Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
Sugiyono. (2007). *Metoda Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
Yin, Robert K. (2011) *Studi Kasus (Desain dan Metode)* Edisi Revisi (terjemahan), Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.